



KAI Kembali Desak untuk Diambil Sumpahnya

Jumat, 16 September 2011 | 16:26



JAYAPURA – Sejak penolakan untuk mengambil sumpah jabatan kepada advokat oleh para ketua Pengadilan Tinggi se Indonesia, dan khususnya di papua terjadi pada 11 Juli lalu, pihak KAI (Kongres Advokat Indonesia) terus berupaya untuk menekan Ketua Pengadilan Tinggi untuk segera mengambil sumpah jabatan advokat, kepada para advokat yang bernaung dibawah KAI.

Desakan tersebut, Jumat (16/9) kembali dilakukan pihak pengurus DPD KAI Provinsi Papua, melalui sekretarisnya, Yuliyanto, SH. “Karena keputusan dari Mahkamah Konstitusi (MK) itu dengan tegas memerintahkan kepada KPT (Ketua Pengadilan Tinggi), bukan kepada Mahkamah Agung. Keputusan itu bersifat final dan tidak ada upaya hukum lagi, sehingga kekuatannya setara dengan undang-undang,” tandas Sekretaris DPD KAI Papua, Yulianto SH, kepada Wartawan di kantornya, Jumat (16/9).

Sehingga menurutnya, saat ini kewenangan ada di tangan KPT. “MA sesuai aturan tidak ada kewenangan untuk ikut campur urusan advokat, sehingga SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) yang menyebutkan terkait pengambilan sumpah jabatan advokat itu tidak perlu,” jelasnya.

Karena itu ia menantang Ketua Pengadilan Tinggi Papua untuk segera mengambil sumpah jabatan advokat yang bernaung dibawah KAI. “Kalupun nanti setelah mengambil sumpah jabatan kami kemudian KPT dicopot dari jabatan, maka kami siap untuk melakukan pembelaan,” tegasnya bersama sejumlah rekan advokat lainnya. Sementara itu, Ketua Pengadilan Tinggi Papua Madya Suhardja saat dihubungi melalui hand phonenya mengatakan bahwa pihaknya tidak dapat melakukan pengambilan sumpah jabatan kepada advokat KAI karena ia harus patuh pada Ketua Mahkamah Agung sebagai atasannya.

“Sesuai surat edaran dari MA, yang bisa dilantik itu hanya permohonan dari Peradi, jadi saya minta bersabar dulu. Toh Ketua MA saat ini kan sudah mau pension,” jelasnya, Jumat (16/9) Dikatakan bahwa ia juga punya banyak keluarga yang berada di bawah bendera KAI yang belum diambil sumpahnya. “Bahkan saya kenalkan sama Pak Amos, Pak Karma, barangkali di Papua ini dengan Otonomi Khusus bisa, karena di Papua terjadi kekurangan banyak advokat,” tuturnya dengan nada datar. Dan membesarnya masalah pengambilan sumpah jabatan advokat KAI tersebut, adalah karena ketidaksabaran dari para advokat terkait. “Yuliyanto yang ngomong. Yuliyanto yang ngotot. Kalau Ketua KAI-nya saya lihat tidak apa-apa, dia bisa mengerti kok,” ujarnya.

Sumber :

<http://bintangpapua.com/port-numbay/14552-kai-kembali-desak-untuk-diambil-sumpahnya>